

# **Policy Brief: Mengapa Perlu ?**

**Dumilah Ayuningtyas**

**Forum Nasional IV**

**Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia**

**Kupang 4-7 September 2013**

# Evolution of evidence based to make policy ( Gray, 99)

- Doing things cheaper
- Doing things better
- Doing things right
  
- (Doing the right things)
- (Doing the right things right)

# What is Policy ?

- 'anything a government chooses to do, or not to do'. (T. Dye)
- Howlett and Ramesh put it 'public policy is a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individuals and organisations' (Dunn, Young & Quinn,
- Tindakan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis & financial sebagai **respons terhadap masalah atau kebutuhan konkrit** di masyarakat. Merupakan tindakan kolektif atau pilihan strategi untuk **memecahkan masalah sosial**, tujuan kebijakan publik adalah **demi kepentingan orang**

# Kebijakan Kesehatan:

- Health policy embraces courses of action that affect the set of institutions, organizations, services and funding arrangements of the health care system.
- It goes beyond health services, however, and includes actions or intended actions by public, private and voluntary organizations that have impact on health. **Walt (1994)**
- **WHO = a formal statement or procedure within instruction (notably government) which defines priorities and the parameter for action in response to health needs, available resources and other political pressure**

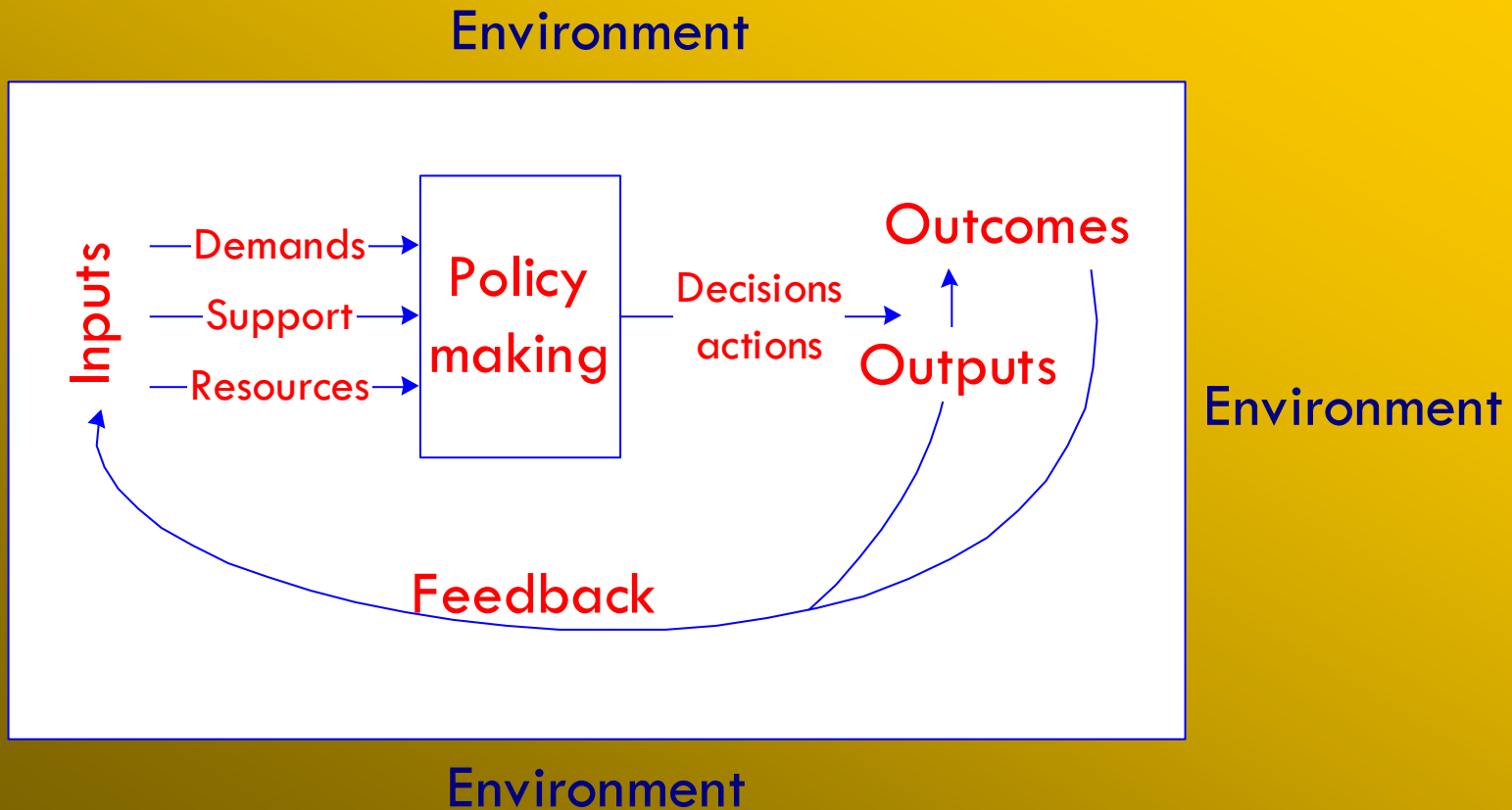
- *“Achieving greater equity in health is a goal in itself, and achieving the various specific global health and development targets without ensuring equitable distribution across and within populations is of limited value (Blas and Sivasankara Kurup, 2010).”*

# THE HEALTH CARE POLICY PROCESS



*Stages in the policy-making process*

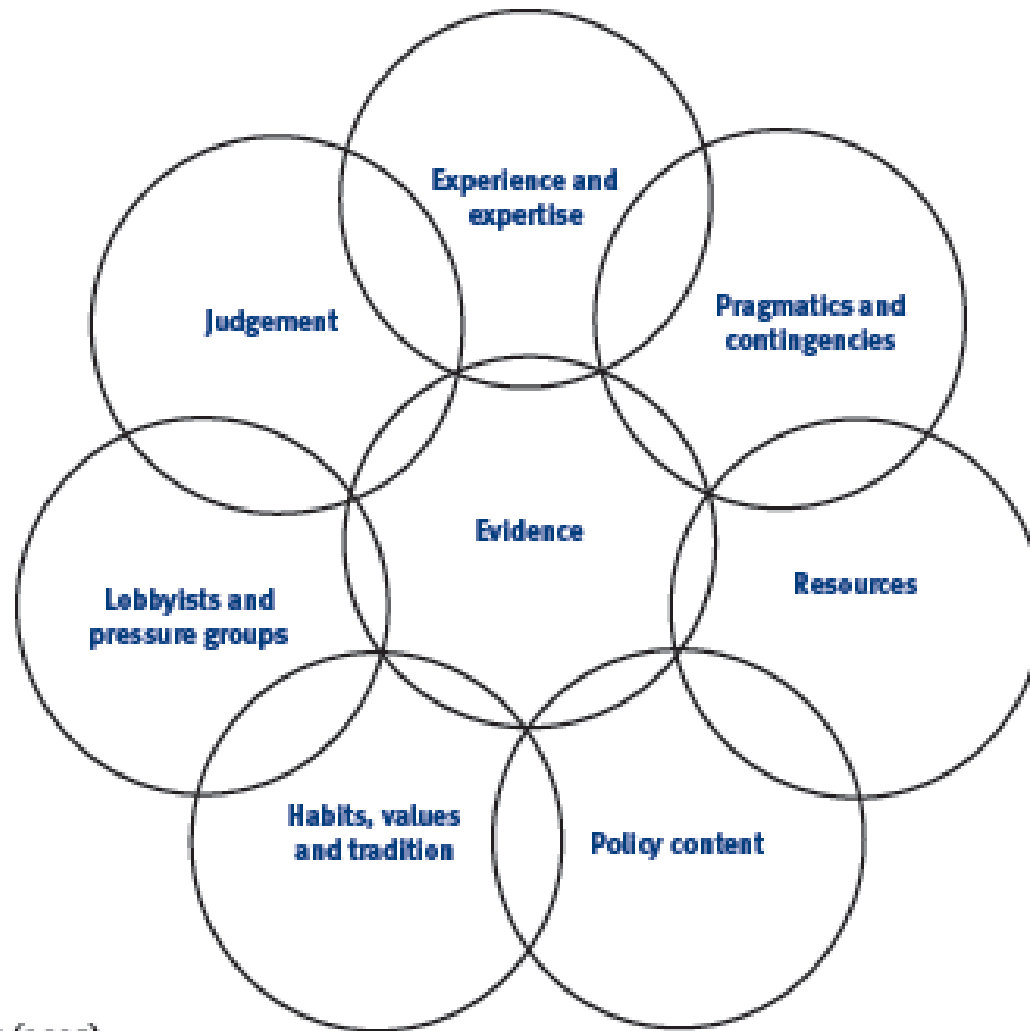
# A system diagram of the policy-making process



# Peran penting akademisi-peneliti



**Figure 1: Factors influencing policy-making**

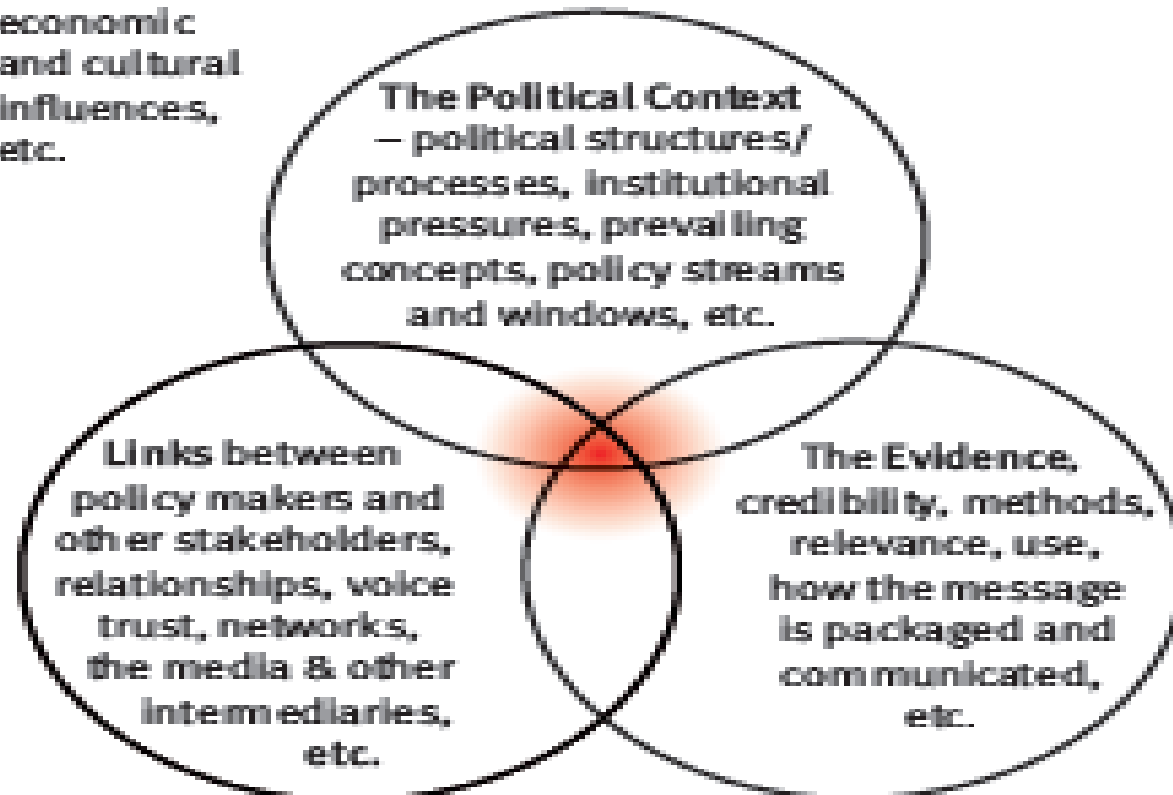


Adapted from Davies (2005)

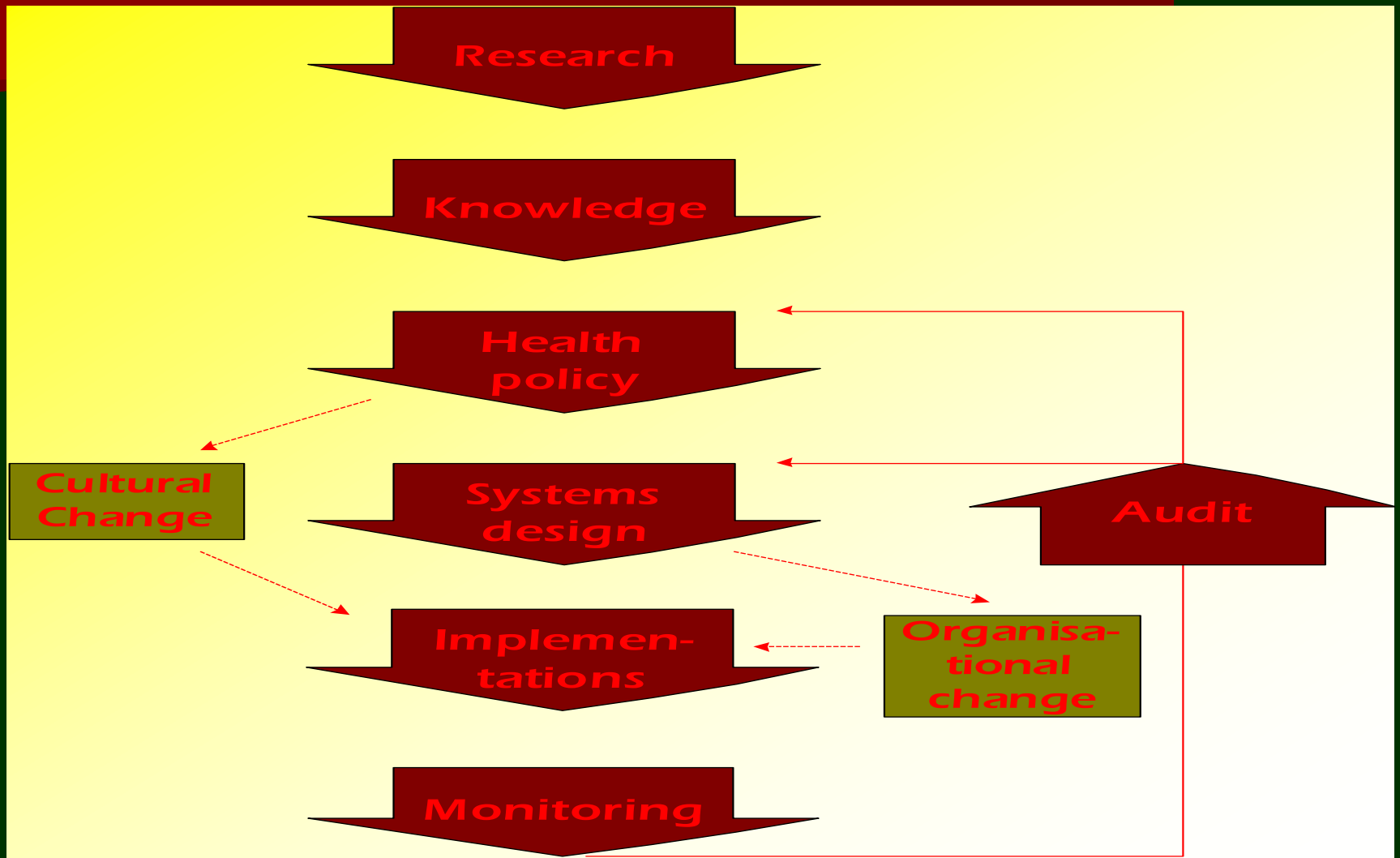
## Figure 3: The RAPID Framework: Context, evidence and links

### External Influences

International factors,  
economic  
and cultural  
influences,  
etc.



# Policy Process - Implementation



# Peran Penting

- Kontribusi riset dalam kebijakan menjadi penting mengingat kebijakan publik yang dibuat tidak berdasarkan data dan riset yang tajam sulit untuk menyampaikan terciptanya kondisi yang lebih baik di masa mendatang,
- Theory Driven Evaluation (Marchal, Dedzo & Kegels, 2010) juga kombinasi penelitian teoritis & empiris dapat membangun pemikiran tentang bagaimana mempengaruhi agenda kebijakan (Shiffman, 2007: *Advocacy in agenda setting*) atau pula mengelola perubahan kebijakan (Walker & Zgilson, 2004; *managing front line providers acting as street level bureaucrats*).

# Policy Analysis

A process of *study/research* in order to  
(1) formulate health policy or  
(2) evaluate health policy implementation

(3) Policy of & Policy for (Gibson L & Dunn)

## Policy formulation

Use specific criterias:

1. Magnitude
2. Determinants
3. Priority
4. Affordability
5. Implementability

## Policy evaluation

Use specific accepted norms:

1. Effectiveness
2. Efficiency
3. Equity
4. Fairness
5. Sustainability
6. Responsiveness

# Jarak antara Pengambil Kebijakan & Peneliti/Akademisi

- Dunn: "..... Pada kenyataannya, ada jarak yang amat lebar antara pembuatan analisis kebijakan dan pemanfaatannya dalam proses pembuatan kebijakan."

# Mengapa Perlu?

- Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang memiliki implikasi politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- Kebijakan yang tidak tepat menghasilkan:
  - Program yang tidak efektif;
  - Pemborosan sumber daya;
  - Masalah yang tidak terpecahkan;
  - Masalah baru yang lebih kompleks.

# WHY POLICY BRIEF???

Fakta berbasis penelitian dapat memberikan kontribusi positif terhadap proses pembuatan & pengambilan kebijakan

Policy Brief dapat menjembatani celah antara penelitian & para pengambil kebijakan.



Singkat, *standalone* dokumen yg membahas isu spesifik yang ditujukan untuk menarik perhatian pembuat kebijakan

#### 4 fungsi utama:

- Menjelaskan & menyampaikan urgensi suatu isu tertentu
- Menyajikan rekomendasi kebijakan atau implikasi suatu isu tertentu
- Menyajikan fakta-fakta untuk mendukung alasan dibalik rekomendasi yang diberikan
- Menunjukkan kepada pembaca sumber-sumber pendukung lainnya mengenai isu tersebut



### Advocacy brief

Argues in favour of a particular course of action

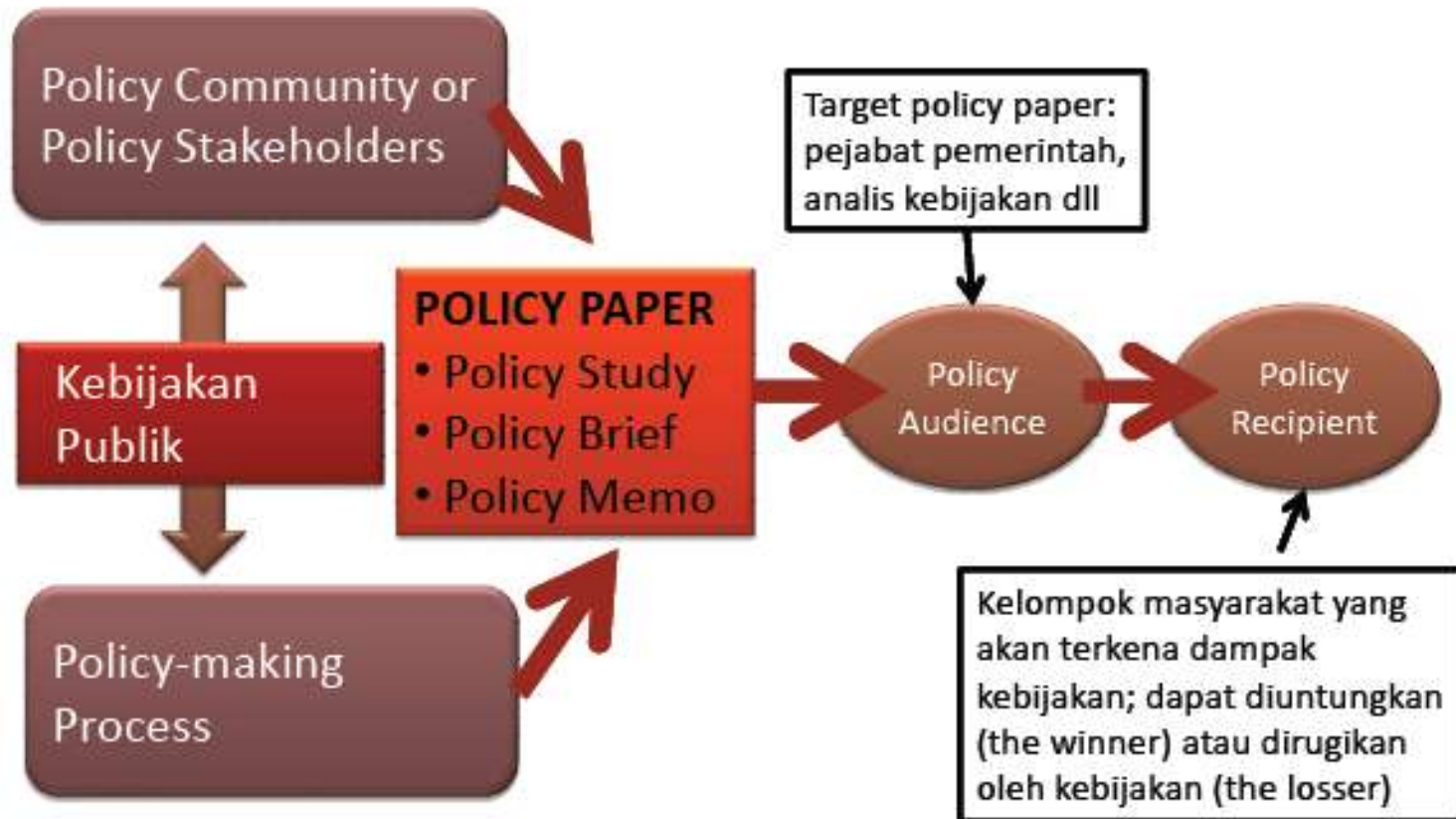
### Objective brief

Gives balanced information for policy maker to make up his or her mind

Menyarankan sebuah policy action

Memberikan informasi berimbang untuk membentuk opini policy maker

# The framework



# Pengertian

The policy brief is a document which ***outlines the rationale for choosing a particular policy alternative or course of action in a current policy debate.***

- Policy briefs are short documents that present the findings and recommendations of a research project to a non-specialist readership. They are often recommended as a key tool for communicating research findings to policy actors (Young and Quinn, 2007).

- Alat komunikasi untuk penetapan kebijakan yang bersifat terapan, **problem-oriented & value-driven** dengan tujuan memberikan argument **komprensif-persuasif** atas berbagai rekomendasi dan opsi kebijakan yang ditunjukkan kepada sasaran/audiens kebijakan untuk melakukan tindakan (misal menyusun atau mengubah agenda kebijakan)

- [health literacy policy brief jun15 e.pdf](#)
- [PB-mentaldisorder.pdf](#)
  
- [PIRT8.pdf](#)

# Komponen “Policy Brief”

- Ringkasan eksekutif
- Pernyataan isu/masalah
- Latar belakang masalah
- Kepentingan organisasi terhadap isu
- Kebijakan saat ini dan sebelumnya yang terkait dengan masalah/isu
- Opsi kebijakan
- Manfaat dan kelemahan dari setiap opsi kebijakan
- Pilihan opsi kebijakan yang disarankan

**Table 1: Key ingredients of effective policy briefs**

Evidence	Persuasive argument	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear purpose</li> <li>• Cohesive argument</li> <li>• Quality of evidence</li> <li>• Transparency of evidence underpinning policy recommendations (e.g. a single study, a synthesis of available evidence, etc.)</li> </ul>
	Authority	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messenger (individual or organisation) has credibility in eyes of policy-maker</li> </ul>
Policy context	Audience context specificity	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Addresses specific context                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; national and sub-national</li> </ul> </li> <li>• Addresses needs of target audience                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; social vs economic policy</li> </ul> </li> </ul>
	Actionable recommendations	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information linked to specific policy processes</li> <li>• Clear and feasible recommendations on policy steps to be taken</li> </ul>
Engagement	Presentation of evidence-informed opinions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentation of author's own views about policy implications of research findings</li> <li>• But clear identification of argument components that are opinion-based</li> </ul>
	Clear language/writing style	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Easily understood by educated, non-specialist</li> </ul>
	Appearance/design	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visually engaging</li> <li>• Presentation of information through charts, graphs, photos</li> </ul>



# Struktur

## Policy Study

- Judul
- Daftar isi
- Abstract/executive summary
- Pendahuluan
- Deskripsi masalah
- Pilihan-pilihan kebijakan
- Kesimpulan dan rekomendasi
- Lampiran
- Referensi
- Catatan kaki/akhir/technical notes (bisa lebih awal; tidak selalu diakhir)

## Policy Brief

- Judul
- Abstract/Executive Summary
- Konteks dan pentingnya masalah
- Kritik terhadap pilihan-pilihan kebijakan
- Rekomendasi kebijakan
- Lampiran
- Referensi

Nama sub-bab (eg. Pendahuluan, konteks dan pentingnya masalah) tidak kaku. Biasanya “kata kunci” teks. Prinsipnya menarik atau membuat “penasaran” pembaca untuk membaca isinya.

# STRUKTUR POLICY BRIEF

<ul style="list-style-type: none"><li>• Executive statement (10%)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ikhtisar singkat dari seluruh bagian policy brief</li><li>• Ditulis terakhir kali</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Introduction (10-15%)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyoroti urgensi masalah menggunakan <i>entry point</i> yang telah diidentifikasi</li><li>• Menyajikan gambaran singkat rangkuman atau arah isi policy brief</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Methodology (5-10%)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Didesain untuk memperkuat kredibilitas policy brief dengan menjelaskan bagaimana temuan &amp; rekomendasi didapatkan</li></ul>

# STRUKTUR POLICY BRIEF

<ul style="list-style-type: none"><li>• Results &amp; conclusions (25%)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Didesain sebagai gambaran akan temuan/fakta penelitian</li><li>• Dibangun atas alur argumentasi sesuai dengan rekomendasi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Implications or recommendations (25%)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bagian yang paling penting dari policy brief</li><li>• Biasanya dibatasi maksimal 3 implikasi/rekomendasi</li><li>• Rekomendasi: diharapkan langsung &amp; jelas mengusulkan tindakan.</li><li>• Implikasi: penyampaian yang <i>less direct</i> → tergantung konteks</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• References &amp; sumber2 lainnya (10%)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membantu pembaca menemukan informasi tambahan lainnya</li><li>• Tuliskan referensi yang penting (seminal) saja.</li></ul>

# Elemen-elemen Policy Brief (1)

1. Judul (pikirkan bagaimana menarik perhatian target audience)

2. Executive Summary (apa yang perlu dimasukkan untuk meyakinkan pembaca sehingga membaca lebih lanjut?)

3. Konteks dan pentingnya masalah (aspek-aspek apa dari permasalahan yang ada yang akan ada fokuskan untuk mengilustrasikan penting dan urgensi masalah tersebut bagi target audience?)

4. Kritik terhadap pilihan-pilihan kebijakan (berapa banyak opsi kebijakan yang akan anda kritisi? Opsi kebijakan yang mana yang anda dukung atau anda kritik?)

Apa argumentasi dan bukti yang akan anda sediakan untuk menunjukkan kekuatan/kelemahan dari opsi-opsi tersebut? Apakah argumentasi dan bukti tersebut akan mampu meyakinkan target audience?

## Elemen-elemen Policy Brief (2)

5. Rekomendasi-rekomendasi kebijakan (langkah atau tindakan spesifik apa yang perlu dilakukan (dan oleh siapa) yang secara realistis dapat diterapkan terhadap opsi yang dipilih?)

6. Lampiran (apakan anda perlu melampirkan data lebih lanjut untuk mendukung argumen-argumen yang dipresentasikan pada "body" Policy Brief?)

7. Referensi (adakah dokumen-dokumen tertulis yang dapat mendukung posisi anda selanjutnya?)

# Alternatif Rekomendasi)

- Susun alternatif rekomendasi berdasarkan hasil penelitian
- Jelaskan implikasi dari setiap rekomendasi
- Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari setiap rekomendasi
- Jelaskan urgensi setiap rekomendasi terhadap permasalahan yang ada
- Analisis instrumen kebijakan dari setiap rekomendasi :
  - Aspek legal
  - Aspek teknis
  - Aspek pembiayaan
  - Aspek SDM

# Evaluasi Rekomendasi

- Pilih opsi kebijakan terpilih yang akan disampaikan, berikan penilaian berdasarkan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timeliness)
- Analisis kemungkinan opsi kebijakan yang direkomendasikan akan didukung oleh decision maker yang menjadi target audience
- Analisis kemungkinan dukungan dan penolakan dari stakeholder lainnya yang berpengaruh dan akan terkena dampak dari pilihan opsi tersebut
- Jelaskan Sasaran opsi kebijakan dan dampak perubahan yang diharapkan

# Kesimpulan dan Penutup

- Sintesis temuan-temuan utama
- Kalimat atau pernyataan penutup yang menegaskan urgensi dari rekomendasi yang disampaikan



Efektifkah ?

- Mendikbud.Kembali.Ingatkan.soal.Bonus.Demografi.htm
- Nasib.Bonus.Demografi.htm
- Policy Brief-ADEfin.docx

- Nasib.Bonus.Demografi.htm
- ..\KONSULTASI\POLICY BRIEF POLICY PAPER BOGOR\Policy Brief-ADEfin.docx

# Perjalanan Panjang

- POLICY PAPER RS 20 Juni 2007.doc
- Policy Paper Harkesnas 2006.doc

# Judul

Topik	Judul	Nama Kelompok
Asi Eksklusif	Menyoroti PP Asi Eksklusif/ Kontroversi Susu Formula dalam PP ASI Eksklusif untuk Menjamin Anak Bangsa Masa Depan	Dwi Susilowati, Hndrianto
Jampersal	Penyertaan dan Pemberdayaan Dukun sebagai Pendamping dalam Meningkatkan Pemanfaatan Jaminan Persalinan	Tony Murwanto, Riswati, ratna, Meda
Dana Dekonsentrasi	Menyoroti Dana Dekonsentrasi : Ketepatan Sasaran Pendanaan	Ratih A, Ida Muas
PMTCT	Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak : Berbagai Opsi Kebijakan (telah siapkah pemerintah ?)	Ingan , Endang I, Retno
Pengendalian Tembakau	Mengapa Sulit Menyusun dan Menerapkan Undang-undang/Peraturan yang Berkaitan dengan Tembakau (integritas dan kapasitas Kepemimpinan dalam penyusunan dan Penerapan Undang-undang)	Wasis S, Galih

<b>Topik</b>	<b>Judul</b>	<b>Kelompok</b>
KIA	Peran rumah Tunggu dalam Menjamin Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Daerah Akses Sulit	Herti, Indah, Ria
Jampersal	Jasa Pelayanan Jaminan Persalinan sebagai Bentuk Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Target MDG	Agung Dwi Laksono, Teti
GAKI	Kebijakan Penggunaan Garam Beryodium: Apakah Masih Diperlukan	Aryastami
OBAT	Pengendalian Harga Obat di Indonesia: Telah Efektifkah Peran Pemerintah ?	SEL MA

# Judul

Topik	Judul	Nama Kelompok
Asi Eksklusif	Menyoroti PP Asi Eksklusif/ Kontroversi Susu Formula dalam PP ASI Eksklusif untuk Menjamin Anak Bangsa Masa Depan	Dwi Susilowati, Hndrianto
Jampersal	Penyertaan dan Pemberdayaan Dukun sebagai Pendamping dalam Meningkatkan Pemanfaatan Jaminan Persalinan	Tony Murwanto, Riswati, ratna, Meda
Dana Dekonsentrasi	Menyoroti Dana Dekonsentrasi : Ketepatan Sasaran Pendanaan	Ratih A, Ida Muas
PMTCT	Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak : Berbagai Opsi Kebijakan (telah siapkah pemerintah ?)	Ingan , Endang I, Retno
Pengendalian Tembakau	Mengapa Sulit Menyusun dan Menerapkan Undang-undang/Peraturan yang Berkaitan dengan Tembakau (integritas dan kapasitas Kepemimpinan dalam penyusunan dan Penerapan Undang-undang)	Wasis S, Galih

<b>Topik</b>	<b>Judul</b>	<b>Kelompok</b>
KIA	Peran rumah Tunggu dalam Menjamin Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Daerah Akses Sulit	Herti, Indah, Ria
Jampersal	Jasa Pelayanan Jaminan Persalinan sebagai Bentuk Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Target MDG	Agung Dwi Laksono, Teti
GAKI	Kebijakan Penggunaan Garam Beryodium: Apakah Masih Diperlukan	Aryastami
OBAT	Pengendalian Harga Obat di Indonesia: Telah Efektifkah Peran Pemerintah ?	SEL MA



# Penguatan Positioning

- penyusunan Policy brief - jaringan kebijakan.html

**Terima Kasih**